

Daftar Pustaka

a. Buku

A.S.S.Tambunan “Politik Hukum berdasarkan UUD 1945” Penerbit; Puporis publishers 2002 *hal;136-137*

Dhaniswara K.Harjono “Problematika Hukum Bisnis dan Korporasi” PPHBI, Hal;144-145

L.J. Apeldoorn “*Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht*”, Penerbit Jakarta :Pradnya Paramita, 2005

Lawrence M friedman, terjemahan dari American law an introduction 2Nd Edition. Alih bahasa, Wisnu basuki, Jakarta Tatanusa, 2001 halaman 6-8

MA.Moegni Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta;Pradnya Paramita 1978

M.S Tumanggor, Sekilas pengetahuan pasar uang,Pasar Modal, OJK dan Penanaman Modal di Indonesia, Penerbit F Media,

Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia; Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian hukum (Jakarta: UI Press, hal.51)

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Kencana Cetakan : Ke 1 ; 2016

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Edisi Revisi I, Cahaya Atma Pustaka

Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit; Fakultas Hukum
Universitas Pellita Harapan, Cetakan Pertama, Jan 2018

Wijono Prodjojudikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit CV.Mandar Maju /
2000/ Bandung

Wiwik Sry Widiarty, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" *cetakan pertama 2016*
Penerbit komodo books

Yusuf Shofie ; "*Hukum Perlindungan Konsumen*" *Penerbit PT.Cutra Aditya*
Bakti Bandung 2011, hal;426

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha
perasuransian.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat

POJK Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi
Perusahaan Perasuransian.

POJK Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

POJK Nomor 19/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana
Syariah

POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi
Perusahaan Perasuransian.

POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi.

POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif.

POJK Nomor 69/POJK/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

POJK Nomor 38/POJK.05/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 69/POJK/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/pmk.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/kmk.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Penerapan GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi.

Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi.

Keputusan Direksi PT.AJS No.186.SK.U.0173 tgl 15 Juli 2013 tentang pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik.

c. Internet

<https://Marketeers.com> December 10, 2015

Siaran Pers MK, Jakarta, 18 Desember 2019.; *<https://www.ojk.go.id/id/berita>*

<https://Republika.Co.Id>, Jakarta Rabu 08 Januari 2020

<https://Jakarta.Co.Jakarta> Rabu, 13 Januari 2021 12:08 wib

<https://Bisnis.com> 07 Juli 2021 | 13:29 WIB

<https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/js-proteksi-plan>

<https://www.bpk.go.id/news/> Siaran Pers BPK 8 Jan 2020

<https://money.kompas.com> 19 desember 2019

Kontan.co.id Selasa, 17 Desember 2019 / 18:27 wib

Hukum Online, 21 Januari 2021

<https://CNBC Indonesia> 28 Desember 2019 18:58

<https://www.ojk.go.id>

http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara

<https://www.beritasatu.com/> Senin, 2 Januari 2012 | 06:00 wib

